

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai sebuah negara yang memiliki 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota terbentang dari Sabang sampai Merauke, Indonesia menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal yang merupakan bagian dari penyelenggaraan otonomi daerah (Christia & Ispriyarso, 2019). Praktik desentralisasi fiskal salah satunya dilatarbelakangi oleh tuntutan bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang gagal dioptimalkan oleh pemerintahan sentralistis (Sidik, 2002). Adanya desentralisasi fiskal di Indonesia membuat pemerintah daerah memiliki kebebasan dalam mengambil keputusan atas wilayahnya dan menentukan tingkat penyediaan pelayanan publik. Di sisi lain, pemerintah daerah dapat pula menjadi *free rider* apabila penyediaan pelayanan publik daerah tetangganya juga dinikmati oleh masyarakat di wilayahnya (Husna & Yudhistira, 2017).

Menurut Brueckner (2003), bagi daerah yang memiliki kewenangan masing-masing, terdapat dua jenis interaksi antardaerah yang dikenal dengan *spillover* model dan *resource-flow* model. Baik *spillover* model maupun *resource-flow* model memperlihatkan bahwa kebijakan suatu pemerintah daerah akan berdampak pada daerah lain. *Resource-flow* model menerangkan bahwa interaksi antara

pemerintah daerah terjadi karena adanya kemudahan perpindahan sumber daya dari satu daerah ke daerah lain atas kebijakan dari pemerintah daerah terkait. Berikutnya, *spillover* model berkaitan dengan penyediaan barang publik oleh suatu daerah yang juga dapat dinikmati oleh daerah lain di sekitarnya.

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Husna & Yudhistira (2017), disimpulkan bahwa kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia menimbulkan interaksi strategis antar pemerintah daerah kabupaten/kota berupa timbulnya kompetisi yang sehat antardaerah dalam membangun daerahnya dan mencapai efisiensi. Hasil studi ini sejalan dengan *Tiebout* model, yang menyatakan bahwa masyarakat dapat berpindah ke daerah yang menyediakan barang publik lebih baik. Adanya kemungkinan perpindahan masyarakat ini mendorong pemerintah daerah berlomba-lomba untuk menghasilkan barang publik yang efisien atau mereka akan kehilangan masyarakatnya yang memilih beralih ke daerah lain (Gruber, 2016).

Di tengah-tengah tergelarnya praktik desentralisasi fiskal di Indonesia, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menginisiasi pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang diberi nama Kawasan Rebana Metropolitan. Pembangunan kawasan ini disebabkan karena telah sesaknya industri di sekitar Karawang dan Bekasi. Upah pekerja di kawasan-kawasan tersebut pun kian meningkat. Disusunnya relokasi industri ke arah utara dan timur Jawa Barat diharapkan dapat mendorong pemerataan ekonomi dan daya saing industri di Jawa Barat. Perpindahan ini berpotensi meningkatkan PDRB Jawa Barat hingga 15–20% (Kemenperin, 2019).

Terdapat tujuh kabupaten/kota yang termasuk dalam Kawasan Rebana, meliputi Kabupaten Subang, Sumedang, Indramayu, Kuningan, Majalengka, Cirebon, dan Kota Cirebon. Tujuh kabupaten/kota tersebut dianggap strategis untuk menggerakkan perekonomian dan menumbuhkan investasi di Jawa Barat (DPMPTSP, 2021). Pendirian Kawasan Rebana semakin kukuh dengan dibuatnya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan.

Berdasarkan lampiran Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021, Kawasan Rebana memiliki keunggulan yang membuatnya dipilih menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Keunggulan-keunggulan tersebut dijabarkan sebagai berikut.

A. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Kompetitif

Seperti telah disebutkan sebelumnya, salah satu alasan pergeseran industri menuju Kawasan Rebana ialah karena upah pekerja di sekitar kawasan industri Karawang, Bekasi, dan sekitarnya kian meningkat. Sementara itu, UMK di Kawasan Rebana belum setinggi UMK di kawasan industri yang sebelumnya sudah ada di Jawa Barat. Oleh karena itu, Kawasan Rebana menjadi alternatif bagi perusahaan industri untuk mengurangi *cost* atau biaya yang perlu dikeluarkan.

B. Konektivitas Tinggi

Di Kawasan Rebana telah dibangun infrastruktur perhubungan, yaitu Pelabuhan Cirebon, Pelabuhan Patimban di Subang, dan Bandar Udara Kertajati di Majalengka. Ketiga infrastruktur ini akan berperan penting menjadi poros perkembangan Kawasan Rebana. Selain tiga infrastruktur tersebut, konektivitas tinggi di Kawasan Rebana ditunjukkan dengan adanya jalan tol dan jalan nontol

yang berguna baik bagi kepentingan industri maupun sebagai penghubung masyarakat dan pelayanan dasar. Selain jalan tol yang sudah ada, seperti Jalan Tol Cikopo–Palimanan, dibangun pula infrastruktur yang termasuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), seperti Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban dan Jalan Tol Cileunyi–Sumedang–Dawuan, serta tidak ketinggalan adanya rencana pengembangan kereta barang dan kereta semi-cepat di Kawasan Rebana. Ketersediaan dan dukungan dalam bidang infrastruktur menjadi nilai tambah bagi Kawasan Rebana.

Pengembangan Kawasan Rebana tentunya perlu diiringi dengan dukungan dari tujuh pemerintah daerah kabupaten/kota yang termasuk di dalamnya. Pada penulisan ini, penulis akan secara spesifik menggali pengalaman di Kabupaten Cirebon. Apabila dibandingkan dengan wilayah sekitarnya yang juga termasuk dalam Kawasan Rebana, seperti Kuningan, Majalengka, dan Indramayu, akses menuju Cirebon lebih mudah. Hal ini karena Cirebon berada di Jalur Pantura sehingga dalam mendukung pengembangan Kawasan Rebana, Cirebon sudah lebih unggul dalam segi akses menuju ke wilayahnya. Kemudian, baik Kabupaten maupun Kota Cirebon, keduanya sama-sama dilewati oleh Jalan Tol Palimanan–Kanci, namun pintu tol hanya berada di wilayah Kabupaten Cirebon, tepatnya di daerah Plumbon, Ciperna, Palimanan, dan Kanci. Selain tol Palimanan–Kanci, Kabupaten Cirebon juga dilewati oleh tol Kanci–Pejagan yang menghubungkan Cirebon dengan Brebes di Jawa Tengah, adapun pintu tol di Cirebon berada di daerah Kanci dan Ciledug. Lalu, dengan luas wilayah 1.070,29 km², yang mana

jauh lebih besar dari luas wilayah Kota Cirebon yang hanya 37,36 km², Kabupaten Cirebon lebih diuntungkan.

Sejak adanya proyeksi Kawasan Rebana, wilayah Kabupaten Cirebon yang sebelumnya didominasi oleh lahan pertanian kini mulai menjelma menjadi kawasan industri, termasuk di dalamnya pabrik tekstil dan sepatu. Perusahaan-perusahaan industri yang berdiri di Kabupaten Cirebon merupakan perusahaan-perusahaan industri yang sebelumnya berdiri di wilayah Tangerang dan Karawang. Perpindahan ini dilatarbelakangi karena jauh lebih rendahnya UMK yang ditetapkan di Cirebon jika dibandingkan dengan dua wilayah tersebut sehingga Cirebon diminati oleh pelaku-pelaku industri (Ashri, 2023).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rahayuningsih (2017) mengenai dampak sosial adanya kawasan industri terhadap masyarakat sekitarnya di Kota Cilegon, disimpulkan bahwa keberadaan kawasan industri meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar karena mampu mengurangi pengangguran. Meski demikian, ternyata adanya kawasan industri juga memiliki dampak negatif. Munculnya lapangan pekerjaan akibat berdirinya kawasan industri membuat Kota Cilegon dihampiri pendatang yang mengadu nasib. Kesempatan kerja bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan industri pun menurun. Realita tersebut sejalan dengan *Tiebout* model yang menjelaskan bahwa masyarakat akan berpindah ke daerah dengan fasilitas barang publik yang lebih baik (Gruber, 2016).

Melihat dampak yang ditimbulkan oleh adanya kawasan industri di Kota Cilegon dan fakta bahwa Kabupaten Cirebon merupakan bagian dari Kawasan Rebana, tentu menjadi sinyal baik bagi Kabupaten Cirebon untuk dapat memajukan

perekonomiannya melalui pengembangan kawasan industri dan pertumbuhan investasi. Hal ini pun tidak akan lepas dari regulasi yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Cirebon dalam mendukung pembangunan Kawasan Rebana. Nantinya, seluruh upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengurangi pengangguran melalui penyerapan tenaga kerja karena adanya perluasan lapangan pekerjaan.

Dengan demikian, penulis tertarik untuk menilik lebih lanjut dan melakukan analisis mengenai kebijakan pemerintah daerah untuk mendorong investasi dalam industri sehingga terjadi penyerapan tenaga kerja pada tahun 2019–2022. Penyerapan tenaga kerja sendiri merupakan pintu gerbang dalam memajukan kesejahteraan masyarakat. Hasil analisis akan penulis tuangkan dalam karya tulis yang berjudul, “Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penetapan UMK dan Kemudahan Investasi sebagai Upaya Penyerapan Tenaga Kerja di Kawasan Rebana–Studi Kasus Kabupaten Cirebon Tahun 2019–2022”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam karya tulis ilmiah ini meliputi:

- 1) Apa saja kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dalam mendukung kemudahan investasi di Kabupaten Cirebon?
- 2) Bagaimana upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Cirebon?

1.3 Tujuan Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memenuhi tujuan antara lain:

- 1) Mengetahui kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dalam mendukung kemudahan investasi di Kabupaten Cirebon.
- 2) Mengetahui upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Cirebon.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Penulisan karya tulis tugas akhir ini secara umum akan secara spesifik membahas kawasan industri di Kabupaten Cirebon yang termasuk bagian dari kawasan Rebana. Data yang diperlukan dalam penulisan ini adalah data UMK, data realisasi investasi atau penanaman modal, data pertumbuhan industri, data pencari kerja, dan data penyerapan tenaga kerja. Selain itu, penulis perlu mencari informasi melalui narasumber-narasumber yang terlibat dalam pendirian kawasan industri di Kabupaten Cirebon.

1.5 Manfaat Penulisan

Dengan adanya karya tulis tugas akhir ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak sebagai berikut.

- 1) Manfaat Teoretis

Penulisan karya tulis tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi salah satu sarana untuk memberikan informasi dan menambah wawasan dalam hal desentralisasi fiskal serta upaya pemerintah daerah dalam memajukan perekonomian dan kesejahteraan masyarakatnya.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu penulis dalam memenuhi syarat untuk lulus dari program studi Diploma III Kebendaharaan Negara Alih Program pada Politeknik Keuangan Negara STAN. Selain itu, penulisan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan menulis penulis dan meningkatkan pemahaman penulis terhadap implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia.

b. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Cirebon untuk menjadi pertimbangan dalam menentukan regulasi yang paling sesuai dalam mendukung sektor usaha dan perkembangan kawasan industri.

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan pembaca terkait desentralisasi fiskal dan implementasinya di Indonesia, serta upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kemampuan perekonomian daerahnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Karya tulis tugas akhir ini terdiri dari empat bab dan tiap-tiap bab terdiri dari beberapa subbab yang memiliki urutan penulisan sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi gambaran umum mengenai karya tulis tugas akhir. Pada bagian ini, penulis menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup pembahasan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan karya tulis tugas akhir ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini, penulis menyajikan teori-teori yang menjadi acuan dasar dari penulisan karya tulis tugas akhir. Teori-teori yang akan disajikan meliputi teori mengenai *Tiebout* model, investasi atau penanaman modal, dan tenaga kerja. Kemudian, penulis akan menggambarkan kerangka berpikir penulisan ini.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai metode pengumpulan data, gambaran umum objek penulisan, dan kemudian melakukan pembahasan terkait data sekunder yang diperoleh serta hasil wawancara.

1) Metode Pengumpulan Data

Pada bagian ini, penulis akan menguraikan mengenai jenis data yang akan digunakan untuk menunjang karya tulis tugas akhir beserta cara memperoleh data-data tersebut. Selain itu, alasan mengapa data-data tersebut menjadi relevan untuk melengkapi karya tulis tugas akhir ini juga akan disampaikan oleh penulis.

2) Gambaran Umum Objek Penulisan

Bagian ini akan memberikan gambaran mengenai objek utama dalam penulisan. Penulis akan memperkenalkan objek penulisan beserta korelasinya dengan masalah yang telah dirumuskan dan tujuan yang telah diuraikan dalam karya tulis ini.

3) Pembahasan Hasil

Bagian ini akan menjadi wadah bagi penulis untuk menuangkan hasil dari pengumpulan data yang telah dilakukan. Penulis akan menghubungkan data satu dengan yang lainnya kemudian merangkainya menjadi satu kesatuan sehingga dapat tersaji dengan baik dan dipahami oleh pembaca.

BAB IV SIMPULAN

Dalam bab ini, penulis akan menjabarkan kesimpulan atas uraian-uraian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya. Penulis juga akan memberikan pandangannya atas topik yang diangkat dalam penulisan ini.